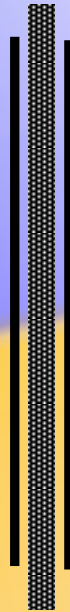




**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2021**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEDIRI**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
A.1 Capaian Kinerja Dibanding Rencana Kinerja Tahun 2021.....	22
A.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	27
A.3. Capaian Realisasi Kinerja Dibanding Target Jangka Menengah Pada Renstra	29
A.4 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan	32
A.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	42
A.6 Analisis Program/Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja.....	46
B. Realisasi Anggaran	48
Bab IV PENUTUP	55

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- Lampiran 1. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021
- Lampiran 2 Rencana Aksi Tahun 2021
- Lampiran 3. Pengukuran Kinerja DP2KBP3A Kabupaten Kediri Th 2021
- Lampiran 4. Perjanjian Kinerja 2020

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap akhir tahun anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati Kediri dalam rangka mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2021. Dengan melaksanakan pelaporan, pengukuran dan evaluasi pencapaian kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel bagi semua pihak mengenai kinerja DP2KBP3A Kabupaten Kediri.

Masukan dan saran dari semua pihak untuk meningkatkan kinerja DP2KBP3A Kabupaten Kediri di masa mendatang masih diharapkan.

Kediri, Pebruari 2022

Plt. Kepala DP2KBP3A
Kabupaten Kediri

dr. NURWULAN ANDADARI MMRS.

Pembina

NIP. 19681029 200312 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government).

Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Kinerja Instansi Pemerintah merupakan tolok ukur bagi Pemerintah Daerah dalam mengukur Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh

aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada *input* (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kepercayaan dan amanat yang telah diberikan serta untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja (performance improvement) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumber daya yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan. Dalam Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri kepada pihak-pihak yang memberi amanah/mandat;
2. Memberikan informasi capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dikerjakannya/diembannya;
3. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri;

4. Peningkatan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri;
5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga tugas - tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif.

3. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah :

1. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sebagai unsur penunjang sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pelaksana perumusan kebijakan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan Anak. Sejalan dengan hal tersebut guna memperjelas arah dan langkah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai penekanan yang ada dalam Rencana

Strategis (RENSTRA) DP2KBP3A.. Langkah-langkah sebagai kunci strategis dalam mencapai keberhasilan adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak (P2KBP3A);
- b. Pembinaan penyelenggaraan P2KBP3A
- c. Koordinasi dan sinkronisasi P2KBP3A
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan P2KBP3A
- e. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik

5. KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri melaksanakan tugas urusan pemerintahan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, DP2KBP3A menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak,
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak,
3. Pelaksanaan dibidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak,
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan dibidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak,
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dibidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak,

6. Pembinaan penyelenggaraan dibidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak,
7. Pelaksanaan administrasi pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak,
8. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati, dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala DP2KBP3A dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- a. *Sekretaris* yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

Sekretaris dibantu oleh :

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Sub Bagian Keuangan
- Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

- b. *Kepala Bidang Pengendalian Penduduk* yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas dibidang pengendalian penduduk

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dibantu oleh :

- Kepala Seksi Perencanaan Pengendalian Penduduk
- Kepala Seksi Informasi Kependudukan dan Keluarga

- c. *Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana* yang mempunyai tugas melaksanakan, mengelola dan mengendalikan program pelayanan dan pembinaan Keluarga Berencana, advokasi dan kesehatan reproduksi remaja.

Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana dibantu oleh

- Kepala Seksi Kesertaan ber-KB dan Jaminan Ketersediaan Alat Kontrasepsi
- Kepala Seksi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

- d. *Kepala Bidang Keluarga Sejahtera* yang mempunyai tugas melaksanakan, mengelola, mengendalikan ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta peningkatan peran serta masyarakat.

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dibantu oleh :

- Kepala Seksi Ketahanan Keluarga
- Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Penggerakan Lini Lapangan

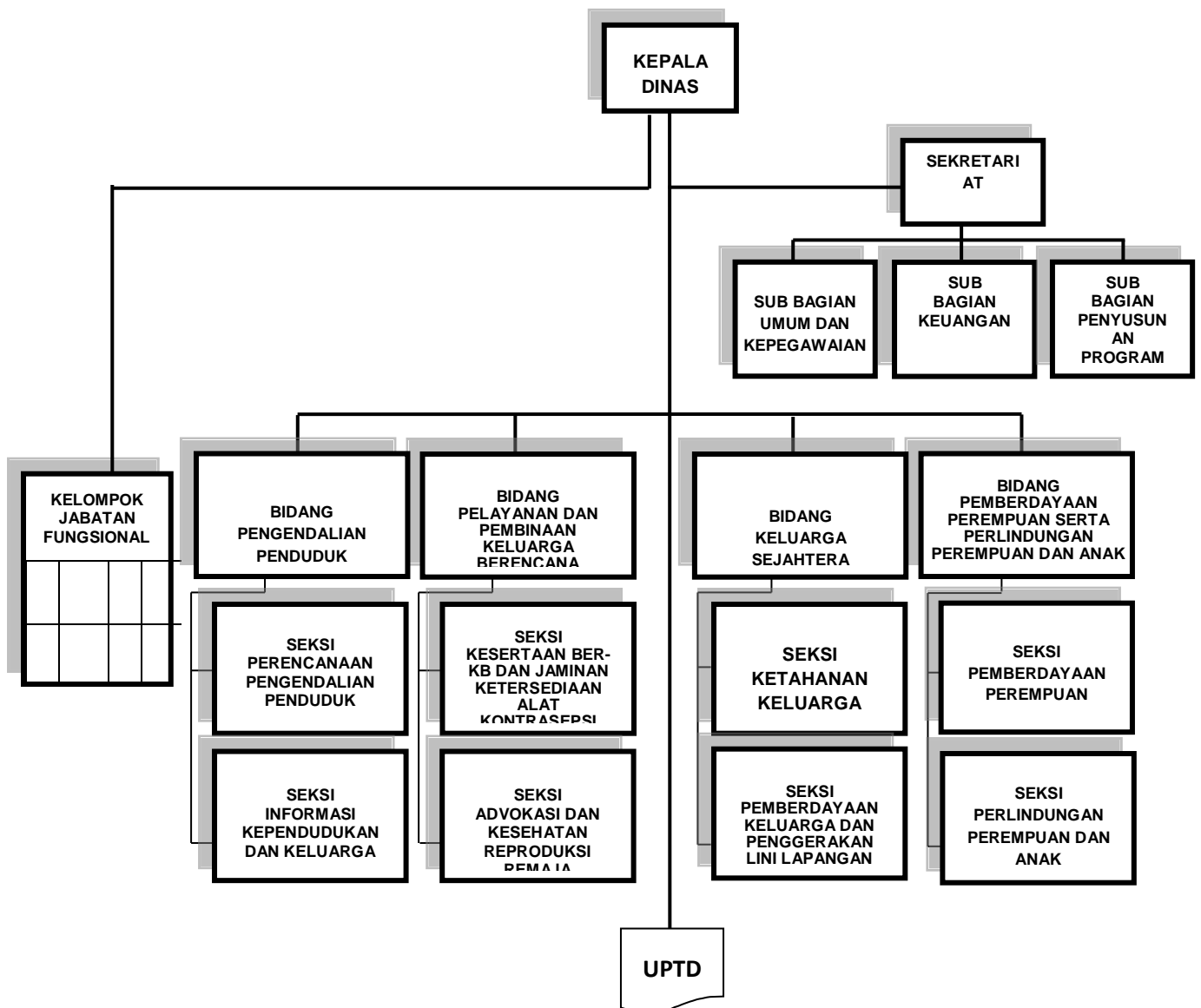
e. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Serta Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Serta Perlindungan Perempuan dan Anak dibantu oleh :

- Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan
- Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Struktur Organisasi DP2KBP3A



6. Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana

a. Sumber Daya Aparatur

Jumlah seluruh personel Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri per 1 Januari 2021 sebanyak 25 orang pegawai daerah, 2 tenaga kontrak dan 60 orang penyuluh KB sebagai Pegawai Pusat. Pegawai daerah di DP2KBP3A menurut jenis kelamin dan Jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasar Jabatan

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jabatan				Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Pelaksana	
1	PNS	3	21	0	3	8	13	24
2	Calon PNS	0	0	0	0	0	0	0
3	Tenaga kontrak	3	0	0	0	0	0	3
	Jumlah	5	18	0	3	8	13	27

b. Sarana dan Prasarana

Guna memperlancar Program dan kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung sarana prasarana. Sarana dan prasarana yang ada di DP2KBP3A adalah :

Tabel 1.3
Tabel Sarana dan Prasarana

No	Nama / Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Sepeda Motor	101 unit	
2.	Kendaraan Dinas Roda 4	4 unit	
3.	Mobil Unit Penerangan	1 unit	
4.	Mobil Unit Pelayanan	1 unit	
5.	Mobil Pengangkut Akseptor	1 unit	
6.	Mobil Box	1 unit	
7.	Balai Penyuluhan	26 gedung	Kecamatan
8.	Public Adress (PA)	22 unit	kecamatan
9.	Personal Komputer	54 buah	kecamatan dan kantor
10.	Laptop	25 buah	Kecamatan dan kantor
11.	Printer	56 buah	kecamatan dan kantor
12.	Sarana Internet	28 jaringan	kecamatan dan kantor
13.	LCD dan proyektor	32 unit	kecamatan dan kantor

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu secara sistematis dan berkesinambungan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Penyusunan RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja DP2KBP3A Kabupaten Kediri dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 - 2021 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Jangka Panjang menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021.

1. VISI

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Panjang menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021. Perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan diarahkan untuk mencapai perwujudan visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021, yakni :

“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif dan Berkeadilan yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”

2. MISI

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Kediri dirumuskan misi yang mendukung pencapaian visi tersebut. Berkaitan dengan misi yang telah dirumuskan maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri mendukung melalui misi ke 10 yaitu ***Memantapkan pembangunan kependudukan yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan.***

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kediri sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun tujuan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan kualitas pelayanan KB
- b. Meningkatkan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan.

Tabel hubungan antara Misi Dan Tujuan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel II.1
Hubungan Misi Tujuan Dan Indikator DP2KBP3A

MISI	TUJUAN	INDIKATOR
Memantapkan pembangunan kependudukan yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan	1 Meningkatkan pelayanan kualitas pelayanan KB	1 Prevalensi Peserta KB Aktif
	2 Meningkatkan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

4. SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Adapun sasaran organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dan pembangunan keluarga
- b. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

Tabel II.2
Hubungan Tujuan dan Sasaran DP2KBP3A

TUJUAN		SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
1 Meningkatkan pelayanan kualitas pelayanan KB	1 Prevalensi Peserta KB Aktif	1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dan pembangunan keluarga	1 Persentase peserta KB aktif MKJP
			2 Persentase PUS anggota kelompok BKB, BKR, BKL yang ber-KB

TUJUAN		SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
2 Meningkatkan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	2 Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	1 Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A

5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROGRAM

Strategi yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut

1. Memperkuat dan memadukan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
2. Meningkatkan pelayanan KB dengan menggunakan MKJP dengan memberikan informasi yang berkesinambungan.
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai di setiap fasilitas Kesehatan KB dan jejaring pelayanan
4. Meningkatkan advokasi program kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga
5. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama kepada instansi atau dinas terkait serta lembaga swasta
6. Merumuskan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan gender dan anak
7. Meningkatkan penguatan kelembagaan jaringan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak-hak anak
8. Menyediakan data terpilah pengarusutamaan gender dan anak
9. Meningkatkan ekonomi produktif berbasis berbasis gender
10. Mewujudkan Kabupaten Layak Anak

Kebijakan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan DP2KBP3A Kabupaten Kediri melalui :

1. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan Keluarga Berencana
2. Meningkatkan penggerakan masyarakat
3. Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana
4. Meningkatkan pemberdayaan keluarga
5. Mengembangkan kelompok bina keluarga
6. Menyediakan data kependudukan
7. Menurunkan angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

8. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak
9. Mendorong peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan

Isu-su strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DP2KBP3A Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

1. Total Fertility Rate 2,1
2. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Tingginya PUS ingin ber-KB tapi belum ber-KB (unmet need)
4. Tingginya perkawinan pertama perempuan usia < 20 tahun
5. Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB
6. Sulitnya mendapatkan data akurat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak serta data pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

6. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2021 adalah sebagaimana berikut :

- a. Persentase Peserta KB aktif MKJP
- b. Persentase PUS anggota kelompok BKB, BKR, BKL ber-KB
- c. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Merencanakan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan perencanaan kinerja tahunan berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah dirumuskan, dimulai dari merencanakan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, disertai dengan pencanangan target yang akan direalisasikan dari masing - masing indikator sasaran.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang sekarang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun



2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, program, kegiatan dan sub kegiatan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri telah disesuaikan dengan peraturan tersebut. Adapun Rencana Kinerja Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri adalah sebagaimana pada tabel berikut :



Tabel II.3
Rencana Kerja Tahunan
Tahun 2021

SASARAN			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
Uraian	Indikator Sasaran	Target				
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dan pembangunan keluarga	1. Persentase Peserta KB Aktif MKJP	30%	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	<i>Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga</i>	100%	1.852.098.400
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah SSK yang mendapatkan pembinaan	11 sekolah	33.365.000
			a. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah SSK yang mendapatkan pembinaan	11 sekolah	33.365.000
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi Program KKBPK	1 dokumen	1.818.733.400
			a.Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen profil KKBPK yang disusun	1 dokumen	10.707.800
			b.Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen laporan data dan informasi keluarga	2 dokumen	9.820.000
			c.Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah dokumen laporan capaian program bangga kencana	4 dokumen	126.842.600
			d.Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen laporan pengendalian lapangan	5 dokumen	1.651.200.000
			e.Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan RR klinik	90 klinik	20.163.000
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	<i>Persentase Unmeet need</i>	10,47%	8.941.162.110
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jenis kegiatan advokasi dan KIE yang mendukung program KKBPK	5 jenis	2.121.433.490
			a. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah peserta yang mendapatkan KIE program KKBPK	6000 aksp	117.964.000
			b.Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah peserta rakor tentang KIE yang sesuai dengan kearifan lokal	150 orang	26.199.470
			c.Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah kecamatan yang mendapatkan sarana KIE program KKBPK	26 kec	258.718.400
			d.Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah media yang digunakan untuk mendukung program KKBPK	5 media	29.998.980
			e.Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah balai penyuluhan KB yang mendapatkan operasional	26 balai Peny.	1.688.552.640
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga penyuluh KB yang mendapatkan pembinaan	90%	2.684.768.670
a.Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Ketersediaan kader penyuluh sampai tingkat dusun	3335 orang	2.684.768.670			



SASARAN			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
Uraian	Indikator Sasaran	Target				
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jenis pelayanan dan pendistribusian alkon	4 jenis	2.816.655.950
			a.Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang mendapatkan distribusi alkon	89 faskes	165.951.000
			b.Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB Baru MKJP yang terlayani	5750 akseptor	2.383.985.950
			c.Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Layanan kasus komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	12 bulan	60.000.000
			d.Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana prasarana penunjang pelayanan KB	1 paket	206.719.000
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kampung KB yang di bina	82 Kampung KB	1.318.304.000
			a.Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang di bina	82 Kampung KB	1.318.304.000
	2. Persentase PUS anggota kelompok BKB, BKR, BKL yang ber-KB	BKB 85%; BKR 84,5%; BKL 81%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL)	BKB 31,41%; BKR 26,6%; BKL 34,17%	980.994.000
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok sasaran pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	6 sasaran	906.694.000
			a.Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah KKA dan BKB Kit Stunting yang diadakan	6000 lb / 8 unit	196.502.400
			b.Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pengelola kelompok Tri bina yang dilatih	50 orang	7.518.100
			c.Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader kelompok tri bina yang dilatih	50 orang	7.759.900
			d.Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah masyakat yang yang mendapat sosialisasi 1000 HPK	5250 orang	607.400.000
			e.Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta yang mengikuti peringatan Harganas	20 orang	7.441.000
			f.Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Desa stunting yang dibina	30 desa	80.072.600
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Jumlah pembina dan kelompok PIK yang dibina	16,80%	74.300.000



SASARAN			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
Uraian	Indikator Sasaran	Target				
			Kesejahteraan Keluarga			
			a.Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok PIK yang mendapatkan pembinaan	90 kelompok	70.550.000
			b.Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pembina PIK yang mendapatkan pembinaan	100 orang	3.750.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	80%	392.218.042
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	2 dokumen	4.914.000
			a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.750.0
			b.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	2 dokumen	2.164.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	5 laporan	133.887.003
			a.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	116.436.693
			b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	1 dokumen	10.500.000
			c.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan bulanan /semesteran	1 dokumen	6.950.310
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 laporan	15.600.000
			a.Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 laporan	15.600.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	6 laporan	42.124.650
			a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	1 paket	1.390.000
			b.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	1 paket	7.000.000
			c.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	3 paket	7.263.650
			d.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket pengadaan	12 paket	3.000.000
			e.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	12 laporan	21.071.000
			f.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif	12 dokumen	2.400.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 laporan	34.232.589
			a.Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	12 paket	2.345.600
			b.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	7.859.139
			c.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket pelayanan umum kantor	1 paket	24.027.850



SASARAN			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
Uraian	Indikator Sasaran	Target				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	3 laporan	161.459.800
			a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah jasa	1 paket	117.381.800
			b.Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			c.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 paket	22.078.000
			d.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 paket	22.000.000
2. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A	100%	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang responsif gender	100%	97.285.500
			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	63 OPD	92.988.000
			a.Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah dokumen kebijakan PUG	1 dokumen	92.988.000
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok perempuan yang berperan dalam pembangunan	15 kelompok	4.297.500
			a.Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok perempuan yang berperan dalam pembangunan	15 kelompok	4.297.500
			PROGRAM PER LINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tangani oleh P2TP2A	100%	88.722.500
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen kebijakan perlindungan perempuan	1 dokumen	50.722.500
			a.Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan perlindungan perempuan	1 dokumen	50.722.500
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	12 bulan	38.000.000
			a.Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	12 bulan	38.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat desa	80%	96.604.400
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan event	3 event	96.604.400
			a.Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan event	2 event	96.604.400
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	80%	111.705.000
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen kebijakan perlindungan anak	1 dokumen	45.600.000			
a.Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan perlindungan anak	1 dokumen	45.600.000			
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan pemenuhan hak anak	1 dokumen	66.105.000			



SASARAN			Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran	
Uraian	Indikator Sasaran	Target					
			Kabupaten/Kota				
			a.Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	1 dokumen	3.145.000	
			b.Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan pemenuhan hak anak	1 dokumen	62.960.000	
			JUMLAH				12.467.801.952

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri Tahun 2021 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2021 menjadi tumpuan untuk mewujudkan kinerja output ataupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DP2KBP3A Kabupaten Kediri tahun 2021. Perjanjian Kinerja disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja DP2KBP3A Kabupaten Kediri tahun 2021 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja DP2KBP3A Kabupaten Kediri tahun 2021 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). DP2KBP3A Kabupaten Kediri telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sebagai berikut :

a. *Perjanjian Kinerja Sebelum PAK*

Tabel 2.4 (Sebelum PAK)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEDIRI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dan pembangunan keluarga	- Persentase Peserta KB Aktif MKJP - Persentase PUS anggota kelompok BKB, BKR, BKL yang ber-KB	30% BKB : 85,00% BKR : 84,50% BKL : 81,00%
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	- Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A	100,00%

Program		Anggaran	
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	409.042.480
2	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	104.985.500
3	Perlindungan Perempuan	Rp	74.427.700
4	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	96.604.400
5	Perlindungan Khusus Anak	Rp	49.762.300
6	Pengendalian Penduduk	Rp	1.852.853.900



7	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	9.773.146.890
8	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	1.082.209.000
Jumlah Anggaran Belanja Langsung		Rp	<u>13.443.032.170</u>

Tabel 2.5 (Sesudah PAK)

PERJANIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEDIRI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dan pembangunan keluarga	- Persentase Peserta KB Aktif MKJP - Persentase PUS anggota kelompok BKB, BKR, BKL yang ber-KB	30% BKB : 85,00% BKR : 84,50% BKL : 81,00%
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	- Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A	100,00%

Program		Anggaran	
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.240.790.742
2	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	97.285.500
3	Perlindungan Perempuan	Rp	88.722.500
4	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	96.604.400
5	Perlindungan Khusus Anak	Rp	111.705.000
6	Pengendalian Penduduk	Rp	1.852.098.400
7	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	8.941.162.110
8	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	980.994.000
Jumlah Anggaran Belanja Langsung		Rp	<u>16.409.362.652</u>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja DP2KBP3A dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini. Target yang dimaksud adalah Rencana Kinerja tahun 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

Untuk mengetahui tingkat prosentase pencapaian masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2021, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Adapun cara menghitung pencapaian indikator kinerja sasaran dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Tabel III.1
Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan perbandingan lain yang diperlukan. Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan sumber daya baik dana maupun sumber daya yang ada. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya, baik dana maupun OH.

Tabel III.2
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	> 85	Sangat Berhasil	SB
2.	71 ≤ 85	Berhasil	B
3.	55 ≤ 70	Cukup Berhasil	CB
4.	< 55	Kurang Berhasil	KB

A.1 Capaian Kinerja dibanding Rencana Kinerja Tahun 2021

Capaian Kinerja selama tahun 2021 dibandingkan dengan target rencana kinerja tahunan adalah sebagai berikut :

Tabel III.3

Capaian Kinerja Tahun 2021 DP2KBP3A Kabupaten Kediri

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realiasi (%)	Capaian (%)	Kode	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dan pembangunan keluarga	Persentase peserta KB aktif MKJP	30,00	38,1	127,00	SB	
		Persentase PUS anggota kelompok BKB, BKR, BKL yang ber-KB	BKB	85,00	81,18	95,51	SB
			BKR	84,50	78,00	92,31	SB
			BKL	81,00	74,24	91,70	SB
2.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A	100	100	100	SB	

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja DP2KBP3A selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dan pembangunan keluarga

- a. Indikator Persentase peserta KB aktif MKJP

Realisasi persentase peserta KB aktif MKJP sebesar 38,10%, jumlah peserta KB aktif MKJP sebanyak 77.156 peserta dari peserta KB aktif keseluruhan sebanyak 202.538 akseptor yang berarti bahwa peserta KB aktif dengan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (IUD, MOW, MOP dan Implant) **Sangat Baik** hal ini dapat diketahui hasil dari realisasi capaian kinerja 127,00% dari target kinerja yang telah ditentukan sebesar 30,00% . Peserta KB aktif MKJP yang tinggi akan berpengaruh pada terjadinya drop out pemakaian program KB karena MKJP penggunaannya minimal 3 tahun. Kenaikan capaian kinerja MKJP ini diupayakan dengan pengadakan baik KIE, Konseling maupun pelayan KB khususnya pelayanan MKJP juga melalui pelayanan pendekatan kepada masyarakat. Data capaian peserta KB Aktif MKJP dapat diketahui dari hasil laporan Pengendalian Lapangan (Rek.kab. F1/Dal13) dengan hasil sebagai berikut :

Tabel III.4
Data Pencapaian Peserta KB Aktif
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kabupaten Kediri Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF	PESERTA KB AKTIF MKJP					%
			IUD	MOW	MOP	IMPLANT	TOTAL	
1	SEMEN	8.024	871	698	17	1.184	2.770	34,52
2	MOJO	9.855	1.740	454	6	1.175	3.375	34,25
3	KRAS	6.690	417	549	10	963	1.939	28,98
4	NGADILUWIH	9.224	1.280	617	13	992	2.902	31,46
5	KANDAT	5.799	734	557	7	751	2.049	35,33
6	WATES	11.914	1.755	834	21	1.497	4.107	34,47
7	NGANCAR	5.657	983	450	5	1.134	2.572	45,47
8	PUNCU	7.861	567	601	31	1.089	2.288	29,11
9	PLOSOKLATEN	9.453	1.703	1.082	87	840	3.712	39,27
10	GURAH	9.397	1.616	823	44	621	3.104	33,03
11	PAGU	4.567	571	465	3	460	1.499	32,82
12	GAMPENGREJO	3.649	468	370	13	516	1.367	37,46
13	GROGOL	4.978	540	481	12	547	1.580	31,74
14	PAPAR	6.937	747	536	21	542	1.846	26,61
15	PURWOASRI	6.828	1.130	517	17	605	2.269	33,23
16	PLEMAHAN	8.316	1.548	414	12	860	2.834	34,08
17	PARE	14.226	3.505	769	66	3.560	7.900	55,53
18	KEPUNG	10.749	2.044	621	19	2.769	5.453	50,73
19	KANDANGAN	5.670	834	345	13	1.002	2.194	38,69
20	TAROKAN	9.809	2.745	730	22	1.766	5.263	53,65
21	KUNJANG	5.283	931	419	16	366	1.732	32,78
22	BANYAKAN	7.513	968	343	7	854	2.172	28,91
23	RINGINREJO	6.964	1.253	463	42	718	2.476	35,55
24	KAYEN KIDUL	5.823	1.029	404	4	966	2.403	41,27
25	NGASEM	8.930	1.820	700	15	705	3.240	36,28
26	BADAS	8.422	1.421	1.199	10	1.481	4.111	48,81
	KABUPATEN	202.538	33.220	15.441	533	27.963	77.157	38,10

b. Capaian persentase PUS anggota kelompok BKB, BKR dan BKL yang berKB

i. Kelompok Bina Keluarga Balita

Jumlah PUS anggota kelompok BKB Tahun 2021 sebanyak 16.942 peserta dan PUS anggota BKB yang berKB sebanyak 13.754 peserta atau sebesar 81,18% dari PUS anggota BKB. Bila dilihat dari target kinerja sebesar 85,00% maka untuk realisasi capaian persentase PUS anggota kelompok Bina Keluarga Balita yang berKB sebesar 95,51%. Capaian ini bila dilihat dari skala pengukuran kinerja masuk kriteria **Sangat Berhasil**. Diharapkan bahwa anggota peserta kegiatan BKB

yang PUS semuanya telah ber-KB sehingga mereka dapat mendidik anak balitanya tumbuh kembang secara optimal.

ii. Bina Keluarga Remaja

Jumlah PUS berKB anggota kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) sebanyak 2.900 atau sebesar 82,39% dari PUS anggota BKR sebanyak 3.520 peserta. Bila dilihat hasil capaian dari target kinerja sebesar 83,19% maka untuk realisasi capaian persentase PUS anggota kelompok BKR yang berKB sebesar 97,90%. Capaian ini bila dilihat dari skala pengukuran kinerja masuk kriteria **Sangat Berhasil**. Kegiatan BKR ini diharapkan dapat membantu keluarga yang memiliki remaja supaya bisa mendidik dan membimbing anak remajanya dengan baik sehingga anak remaja tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif.

iii. Bina Keluarga Lansia

Jumlah PUS berKB anggota kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) sebanyak 2.811 peserta atau sebesar 75,22% dari PUS anggota BKL sebanyak 3.737 peserta. Bila dilihat dari capaian target kinerja sebesar 80,44% maka realisasi capaian persentase PUS anggota kelompok BKL yang berKB sebesar 93,51%. Capaian ini bila dilihat dari skala pengukuran kinerja masuk kriteria **Sangat Berhasil**. Kegiatan BKL ini bertujuan menambah pengetahuan dan ketrampilan keluarga yang memiliki lansia mengenai perawatan dan pendampingan terhadap lansia agar menjadi lansia tangguh. Data Jumlah PUS anggota Kelompok BKB, BKR dan BKL yang berKB bersumber dari Rek.Kab.F/IDal13 dengan hasil sebagai berikut :

*Tabel III.5
Data PUS Anggota Kelompok BKB, BKR dan BKL
Kabupaten Kediri Tahun 2021*

NO.	KECAMATAN	PUS ANGGOTA BKB			PUS ANGGOTA BKR			PUS ANGGOTA BKL		
		Semua PUS	PUS ber KB	% Ber KB	Semua PUS	PUS ber KB	% Ber KB	Semua PUS	PUS ber KB	% Ber KB
1	SEMEN	486	458	94,24	76	51	67,11	77	38	49,35
2	MOJO	832	560	67,31	130	130	100	81	52	64,20
3	KRAS	944	703	74,47	36	24	66,67	197	87	44,16
4	NGADILUWIH	991	676	68,21	348	245	70,40	496	357	71,98
5	KANDAT	231	187	80,95	73	56	76,71	114	85	74,56
6	WATES	645	533	82,64	98	92	93,88	71	59	83,10
7	NGANCAR	401	339	84,54	41	33	80,49	29	19	65,52
8	PUNCU	748	662	88,50	207	200	96,62	32	32	100,00
9	PLOSOKLATEN	645	453	70,23	45	38	84,44	195	134	68,72
10	GURAH	1.655	1.147	69,31	142	104	73,24	196	141	71,94
11	PAGU	654	511	78,13	289	82	28,37	154	98	63,64
12	GAMPENGREJO	643	481	74,81	42	25	59,52	75	39	52,00
13	GROGOL	483	412	85,30	142	87	61,27	196	138	70,41
14	PAPAR	894	886	99,11	51	44	86,27	234	209	89,32
15	PURWOASRI	310	271	87,42	179	164	91,62	114	89	78,07



NO.	KECAMATAN	PUS ANGGOTA BKB			PUS ANGGOTA BKR			PUS ANGGOTA BKL		
		Semua PUS	PUS ber KB	% Ber KB	Semua PUS	PUS ber KB	% Ber KB	Semua PUS	PUS ber KB	% Ber KB
16	PLEMAHAN	429	289	67,37	54	43	79,63	129	87	67,44
17	PARE	1.120	1.090	97,32	393	341	86,77	410	384	93,66
18	KEPUNG	497	413	83,10	30	30	100	98	97	98,98
19	KANDANGAN	282	236	83,69	41	41	100	42	27	64,29
20	TAROKAN	281	261	92,88	104	86	82,69	68	61	89,71
21	KUNJANG	259	215	83,01	24	14	58,33	80	66	82,50
22	BANYAKAN	914	840	91,90	440	397	90,23	117	101	86,32
23	RINGINREJO	1.303	1.173	90,02	68	47	69,12	204	143	70,10
24	KAYEN KIDUL	560	425	75,89	265	209	78,87	153	111	72,55
25	NGASEM	421	340	80,76	44	36	81,82	11	9	81,82
26	BADAS	314	193	61,46	84	69	82,14	50	28	56,00
	TOTAL	16.942	13.754	81,18	3446	2688	78,00	3623	2691	74,28

2. Capaian Sasaran Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

a. Indikator Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A

Capaian indikator Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A tahun 2021 tercapai 100% yang artinya bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan ke P2TP2A sejumlah 79 kasus telah ditindaklanjuti semua.

Adapun kasus yang telah ditangani oleh P2TP2A selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

*Tabel. III.6
Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Dan Anak
Ditangani P2TP2A Kabupaten Kediri Tahun 2021*

NO.	KECAMATAN	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Dilaporkan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani	Prosentase Kasus yang ditangani (%)
1	SEMEN	6	6	100
2	MOJO	1	1	100
3	KRAS	2	2	100
4	NGADILUWIH	5	5	100
5	KANDAT	2	2	100
6	WATES	6	6	100
7	NGANCAR	1	1	100
8	PUNCU	1	1	100
9	PLOSOKLATEN	3	3	100
10	GURAH	3	3	100
11	PAGU	2	2	100
12	GAMPENGREJO	2	2	100
13	GROGOL	3	3	100
14	PAPAR	0	0	100
15	PURWOASRI	2	2	100

NO.	KECAMATAN	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Dilaporkan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani	Prosentase Kasus yang ditangani (%)
16	PLEMAHAN			100
17	PARE	16	16	100
18	KEPUNG	6	6	100
19	KANDANGAN	2	2	100
20	TAROKAN	2	2	100
21	KUNJANG			100
22	BANYAKAN	3	3	100
23	RINGINREJO	3	3	100
24	KAYEN KIDUL	2	2	100
25	NGASEM	2	2	100
26	BADAS	4	4	100
	TOTAL	79	79	100

Bila dilihat tabel diatas kasus yang terbanyak berada pada kecamatan Plemahan

A.2 Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan capaian perjanjian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel III.8

Data Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja dari Target Tahun 2017 – 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Realisasi (%)		Ket.
			2020	2021	
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dan pembangunan keluarga	Persentase peserta KB aktif MKJP	127,48	127,00	Turun
		Persentase PUS anggota kelompok BKB, BKR, BKL yang ber-KB	95,30	95,51	Naik
			97,90	92,31	Turun
			93,51	91,70	Turun
2.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A	100	100	Tetap

Dari tabel III.6 diatas dapat diketahui adanya bahwa capaian kinerja tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 semua indikator kinerja sasaran mengalami kenaikan dan penurunan, yang mengalami kenaikan capaian realisasi kinerja pada pencapaian persentase PUS peserta KB kelompok BKB, Sedang pada pencapaian realisasi kinerja peserta KB aktif MKJP, PUS ber-KB peserta kelompok BKR dan PUS ber-KB kelompok BKL mengalami penurunan. Indikator persentase kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A yang pada posisi tetap. Namun demikian bahwa bila dilihat dari skala pengukuran bahwa capaian kinerja masih pada skala sangat baik. Adapun capaian indikator kinerja yang mengalami penurunan meliputi :

a. Hasil Perbandingan Turun

1. Persentase peserta KB aktif MKJP tahun 2021 jika dibandingkan capaian tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 0,48 persen
2. Persentase kesertaan ber-KB PUS anggota BKR tahun 2021 jika dibandingkan capaian tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 5,59 persen
3. Persentase kesertaan ber-KB PUS anggota BKL tahun 2021 jika dibandingkan capaian tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 1,81 persen

b. Hasil Perbandingan Naik

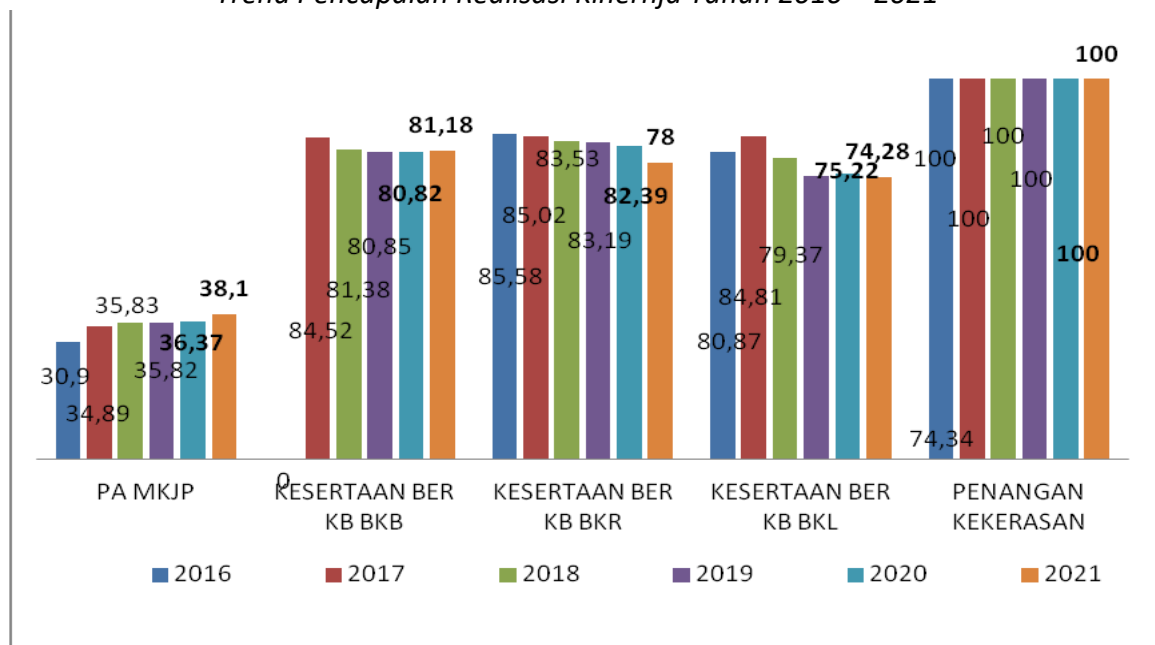
1. Persentase kesertaan ber-KB PUS anggota BKB tahun 2021 jika dibandingkan capaian tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 0,21 persen

c. Hasil Perbandingan Tetap

1. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A tetap 100%. Bila dilihat dari kasus yang terjadi bahwa pada tahun 2021 sebanyak 79 kasus mengalami kenaikan dari tahun 2020 terdapat kasus sebanyak 53 kasus.

Hasil capaian realisasi kinerja selama kurun waktu mulai tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

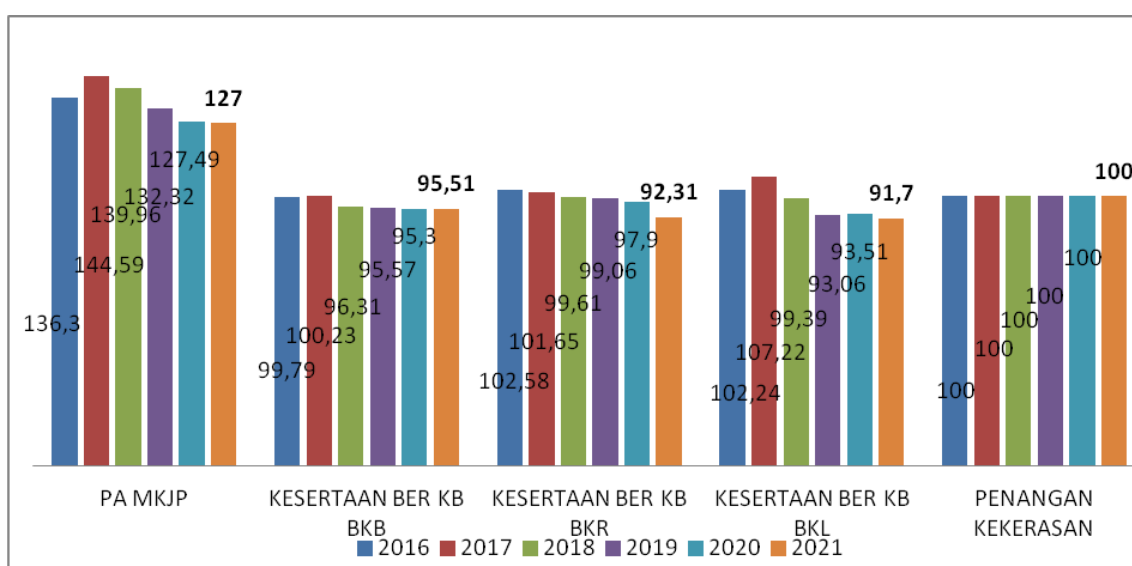
Tabel III.9
Trend Pencapaian Realisasi Kinerjanya Tahun 2016 – 2021



Dari tabel diatas diketahui bahwa trend capaian kinerja selama 2016 – 2021 bervariasi, untuk pencapaian peserta KB aktif MKJP mengalami kenaikan mulai tahun 2016 – 2021 sedang pada indikator yang lainnya mengalami turun naik setiap tahunnya.

Bila dilihat tren capaian realisasi kinerja selama tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

Tabel III.10
Tabel Trend Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2016 – 2021



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja selama tahun 2016 – 2021 tahun terakhir mengalami turun naik namun demikian penurunan maupun kenaikan yang terjadi tidak terlalu ekstrim masih dalam kondisi wajar.

A.3 Capaian Realisasi Kinerja dibanding Target Jangka Menengah pada Renstra

A.3.1 Capaian kinerja tahun 2021 dibandingkan capaian akhir Renstra SKPD 2016 – 2021

Capaian kinerja Tahun 2021 bila dibandingkan dengan Capaian target kinerja pada akhir Renstra SKPD tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.11
Capain realisasi periode akhir Renstra SKPD 2016 - 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (%)	Realiasi Tahun 2021 (%)	Capaian (%)	Kode	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dan pembangunan keluarga	Persentase peserta KB aktif MKJP	30,00	38,1	127,00	SB	
		Persentase PUS anggota kelompok BKB, BKR, BKL yang ber-KB	BKB	85,00	81,18	95,51	SB
			BKR	84,50	78	92,31x	SB
			BKL	81,00	74,28	91,70	SB
2.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A	100	100	100	SB	

Tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis pada akhir Renstra tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dan pembangunan dengan indikator :
 1. Persentase peserta KB aktif MKJP tercapai sebesar 127,00% dari target akhir Renstra dengan kategori **sangat berhasil**
 2. Persentase PUS anggota kelompok BKB, BKR, BKL yang ber-KB
 - BKB tercapai 95,51% dengan kategori **sangat berhasil**
 - BKR tercapai 92,31% dengan kategori **sangat berhasil**
 - BKL tercapai 91,70% dengan kategori **sangat berhasil**
- b. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dengan indikator Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A tercapai sebesar 100% dengan kategori **sangat berhasil**

A.3.2 . Capaian Kinerja RPJMD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, bahwa Program dan kegiatan yang pada Rencana Kerja Tahun 2021 telah disesuaikan dengan peraturan tersebut yang meliputi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Capain kinerja RPJMD di tahun 2021 yang sesuai dengan RPJMD kabupaten Kediri yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.12
Capaian Kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan RPJMD

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kode
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana	- Persentase Unmeet need	10,47%	11,27%	92,35	SB
2.	Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama	- Persentase perkawinan perempuan usia < 20 tahun	16,8%	16,1%	104,16	SB
3.	Tersedianya parameter pengendalian penduduk	- Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	100%	100%	100	SB
4.	Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan keluarga	- Cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok - BKB - BKR - BKL	31,41% 26,6% 34,17%	30,24% 24,06% 33,42%	92,27 90,45 97,80	SB SB SB
5.	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	- Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tangani oleh P2TP2A - Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	100% 80%	100% 100%	123,46 125	SB SB
6.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender	- Persentase OPD yang responsif gender - Persentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat desa	100% 85%	56,76% 100%	56,76 128,81	CB SB

Tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian sasaran program adalah :

- a. Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana dengan indikator
 1. Persentase Unmeet need pada target RPJMD tercapai 95,16% dengan kategori *sangat baik*
- b. Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama dengan indikator persentase perkawinan perempuan usia < 20 tahun 2021 pada target RPJMD tercapai 104,16% dengan kategori *sangat baik*

- c. Tersedianya parameter pengendalian penduduk dengan indikator Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga pada taerget RPJMD tercapai 100% dengan kategori *sangat baik*
- d. Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan keluarga dengan indikator
 - Cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan pada target RPJMD tercapai BKB 96,27%, BKR 90,45% dan BKL 97,80% dengan kategori *sangat baik* untuk capaian kegiatan kelompok kegiatan tersebut.
- e. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan indikator
 1. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tangani oleh P2TP2A dari target RPJMD tercapai 100% dengan kategori *sangat baik*
 2. Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A dari target RPJMD tercapai sebesar 125% dengan kategori *sangat baik*.
- f. Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender dengan indikator :
 1. Persentase OPD yang responsif gender dari target RPJMD tercapai 100% dengan kategori *sangat baik*
 2. Peresentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat desa dari target RPJMD tercapai 125% dengan kategori *sangat baik*

Dari hasil diatas dapai disimpulkan bahwa capaian kinerja terhadap RPJMD selama tahun 2021 ***sangat baik dan berhasil***

A.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Secara umum capaian kinerja sasaran dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Kediri pada tahun anggaran 2021 rata-rata pencapaian target kinerjanya dapat terealisasi dengan sangat baik.

Beberapa masalah yang menjadi perhatian bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah sumber daya manusia, baik didalam kantor maupun tenaga penyuluh KB di lapangan yang saat ini hanya terdiri dari 27 personil di kantor dan 60 tenaga Penyuluh KB dengan rasio 1 : 6 desa.
2. Persentase Unmetneed cukup tinggi;
3. Masih tingginya usia kawin pertama istri kurang dari 20 tahun;
4. Adanya Pandemi Covid-19
5. Masih adanya kasus KDRT;
6. Masih banyaknya kasus kekerasan yang belum dilaporkan

Adapun upaya perbaikan untuk pemecahan masalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dan mengoptimalkan kader desa yang ada,
2. Meningkatkan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Kesehatan Reproduksi Remaja
3. Pendekatan kepada tokoh masyarakat agar berperan aktif dalam Pendewasaan Usia Perkawinan.
4. Meningkatkan pelayanan KIE dan Advokasi KB pada masyarakat.
5. Optimalisasi peran Kampung KB menuju keluarga sejahtera
6. Pelayanan KB yang murah dan berkualitas
7. Pembentukan forum anak yang bisa mewakili aspirasi anak tingkat kecamatan sampai tingkat desa
8. Terbentuknya sistem dalam memberikan perlindungan perempuan, anak, lansia dan difabel
9. Adanya payung hukum tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak
10. Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
11. Koordinasi dengan Dinas kesehatan, Dinas Sosial, RSUD kabupaten, dan Polres/Polresta untuk pelatihan dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan oleh tenaga P2TP2
12. Meningkatkan koordinasi di Tim Kabupaten Layak Anak (KLA)

A.4.1 Analisa Sasaran Strategis

- a) Sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dan pembangunan keluarga

Realisasi kinerja dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dan pembangunan keluarga dapat diketahui dari indikator :

i. Persentase peserta KB aktif MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) tahun 2021 telah terealisasi sebesar 38,1% atau sebesar 127% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini sangat baik karena dengan meningkatnya kesertaan berKB aktif MKJP akan meningkatkan keberlangsungan berKB sehingga dapat menekan resiko dropout pemakaian alat kontrasepsi. Pemakaian kontrasepsi MKJP pada dasarnya pemakaian dengan metode sekali pasang untuk jangka waktu tertentu minimal 3 tahun dengan tujuan untuk menunda kehamilan maupun mengakhiri kehamilan.

a. Kendala

Dalam mencapai target pada tahun 2021 kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan capaian peserta KB aktif MKJP adalah sebagai berikut :

1. SDM petugas lapangan yang masih kurang
2. Ketersediaan data yang masih kurang akurat
3. Jumlah unmet need dengan resiko tinggi cukup banyak
4. Masih perlu dan ditingkatkan pengetahuan masyarakat tentang Program KKBPK
5. Adanya Pandemi Covid-19

b. Solusi

Guna meningkatkan pencapaian peserta KB aktif MKJP telah dilakukan upaya-upaya selama kurun waktu tahun 2021 dalam kaitanya pencapaian kinerja diantaranya :

1. Pendekatan kepada tokoh formal maupun informal
2. Peningkatan pelayanan KB melalui pendekatan pelayanan kepada masyarakat terutama daerah yang sulit terjangkau oleh pelayanan puskesmas dan klinik swasta
3. Peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak baik LSM maupun organisasi profesi
4. Peningkatan pelayanan KB MKJP melalui pelayanan mobile KB
5. Penyiapan ketersediaan alat kontrasepsi
6. Peningkatan pembinaan kepada petugas lapangan serta meningkatkan peran aktif kader di desa
7. Akurasi data pada setiap tingkatan wilayah dengan mengadakan pelatihan, pembinaan dan update data

8. Pembinaan kepada unmet need dengan melibatkan instansi terkait
9. Efektifitas kegiatan KIE tentang KKBPK melalui media cetak maupun elektronik

ii. Persentase PUS (Pasangan Usia Subur) anggota kelompok BKB (Bina Keluarga Balita) yang ber-KB tahun 2021 telah terealisasi sebesar 81,18% atau sebesar 95,51% dari target yang telah ditetapkan.

Persentase PUS (Pasangan Usia Subur) anggota kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja) yang ber-KB tahun 2021 telah terealisasi sebesar 78,00 % atau sebesar 92,31% dari target yang telah ditetapkan.

Persentase PUS (Pasangan Usia Subur) anggota kelompok BKL (Bina Keluarga Lansia) yang ber-KB tahun 2021 telah terealisasi sebesar 74,28 % atau sebesar 91,70% dari target yang telah ditetapkan.

a. Kendala

Dalam upaya mencapai target pada indikator kinerja Persentase PUS (Pasangan Usia Subur) anggota kelompok BKB, BKR dan BKL yang ber-KB dalam kurun waktu 2021 mengalami kendala diantaranya :

1. Terbatasnya SDM/kader kelompok tribina di desa karena diketahui bahwa setiap kader di desa sebagian besar memiliki tugas atau berperan berbagai kegiatan yang bertumpu pada desa
2. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan kelompok Tri bina
3. Kurangnya anggaran operasional kegiatan
4. Jumlah petugas yang masih jauh dari harapan
5. Banyaknya kegiatan yang ada pada level bawah
6. Adanya pandemi Covid-19

b. Solusi

Guna mengatasi kendala hal tersebut diatas selama kurun waktu tahun 2021 telah dilaksanakan :

1. Meningkatkan pembinaan kepada kader di desa maupun kecamatan melalui kegiatan revitalisasi kader

2. Meningkatkan kegiatan KIE kepada masyarakat tentang pentingnya kegiatan Tribina
 3. Meningkatkan pengetahuan kepada petugas melalui pelatihan baik tingkat kabupaten maupun di tingkat propinsi
 4. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi terhadap instansi terkait.
- iii. Sasaran meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender
- Sasaran meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender dengan indikator persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A telah tercapai 100% yang berarti bahwa jumlah kasus yang masuk pada P2TP2A kesemuanya telah tertangani. Jumlah kasus pada tahun 2021 sebanyak 79 kasus mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 sebanyak 53 kasus.
- a. Kendala
- Selama tahun 2021 dalam menangani kasus yang telah dilaporkan ke P2TP2A telah mengalami kendala dalam pelaksanaannya yaitu :
1. Derasnya arus informasi oleh media elektronik yang dengan mudah dapat diakses sehingga situs2 yang terlarang dengan mudahnya dapat diakses
 2. Lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya
 1. Tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan semakin meningkat
 2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang undang-undang perlindungan perempuan dan anak
 3. Koordinasi yang masih kurang antar dinas/instansi terkait
- b. Solusi
1. Pembentukan forum anak yang bisa mewakili aspirasi anak tingkat kecamatan sampai tingkat desa
 2. Terbentuknya sistem dalam memberikan perlindungan perempuan, anak, lansia dan difabel
 3. Adanya payung hukum tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak
 4. Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

5. Koordinasi dengan Dinas kesehatan, Dinas Sosial, RSUD kabupaten, dan Polres/Polresta untuk pelatihan dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan oleh tenaga P2TP2
6. Meningkatkan koordinasi di Tim Kabupaten Layak Anak (KLA)

A.4.2 Analisa Sasaran Program

Secara keseluruhan bahwa capaian kinerja sasaran program di tahun 2021 DP2KBP3A Kabupaten Kediri dapat dikategorikan sangat baik. Adapun analisa tingkat capaian sasaran program secara keseluruhan dapat di lihat di bawah ini :

a) Sasaran Program Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern

Tingkat capaian kinerja sasaran program meningkatnya pemakaian kontrasepsi modern meliputi indikator kerja :

- i. Persentase unmet need tingkat capaiannya sebesar 92,35% dari target dengan kategori *Sangat Berhasil*. Unmet need merupakan sasaran dalam perolehan peserta KB baru . Tahun 2021 capaian kinerja persentase unmet need tercapai dibawah target . Namun demikian unmet need di tahun 2021 perlu mendapatkan perhatian terutama pada sasaran yang mempunyai resiko tinggi untuk hamil maupun melahirkan terutama PUS pada usia 40 tahun keatas. PUS Usia 40 tahun sebaiknya terlindungi oleh alat kontrasepsi.

Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian unmet need meliputi :

1. PUS yang salah satu pasangannya tidak di rumah
2. PUS yang merasa usia diatas 40 tahun tidak akan hamil lagi meskipun tidak terlindungi kontrasepsi
3. Adanya keinginan mempunyai anak lebih dari 2
4. Adanya Pandemi Covid 19

Solusi

1. Meningkatkan kegiatan KIE pada PUS yang belum ber-KB
2. Pendekatan pada tokoh masyarakat maupun agama untuk mendukung program KKBPK

b) Sasaran Program meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Tingkat capaian Kinerja sasaran program meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan keluarga meliputi indikator :

- i. Persentase cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan Bina Keluarga Baliata (BKB) tingkat capaian

sebesar 96,27% dengan kategori *Sangat Berhasil*. Secara keseluruhan bahwa target sasaran untuk menjadi anggota kelompok BKB dapat terpenuhi di tahun 2021.

Kendala

1. Adanya pandemi Covid-19 sehingga untuk kegiatan yang mengumpulkan orang banyak ditiadakan
2. Kader di desa banyak yang merangkat menjadi kader kegiatan lain
3. Sarana dan prasarananya masih belum mencukupi

Solusi

1. Mencari kader-kaber baru
 2. Pengadaan kebutuhan kegiatan BKB
 3. Revitalisasi Kader BKB
- ii. Persentase cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) tingkat capaian sebesar 90,40% dengan kategori *Sangat Berhasil*. Secara keseluruhan bahwa target sasaran untuk menjadi anggota kelompok BKR dapat terpenuhi di tahun 2021

Kendala

1. Adanya pandemi Covid-19
2. Kader di desa banyak yang merangkat menjadi kader kegiatan lain
3. Pemahaman keluarga pada kelompok BKR masih kurang

Solusi

1. Advokasi ke desa oleh petugas dan kader tentang pentingnya BKR
 2. Mencari kader-kaber baru
 3. Revitalisasi Kader BKR
- iii. Persentase cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) dengan tingkat capaian sebesar 97,80% di tahun 2021 tingkat capaian sebesar dengan kategori *Sangat Berhasil*. Secara keseluruhan bahwa target sasaran untuk menjadi anggota kelompok BKL dapat terpenuhi di tahun 2021

Kendala

1. Adanya pandemi Covid-19

2. Kader di desa banyak yang merangkat menjadi kader kegiatan lain
3. Pemahaman Anggota kelompok BKL tentang pentingnya masih kurang
4. Kegiatan lansia dilingkungan yang masih kurang

Solusi

1. Advokasi ke desa oleh petugas dan kader tentang pentingnya BKL
 2. Mencari kader-kader baru
 3. Revitalisasi Kader BKL
 4. Mengikutsertakan lansia pada kegiatan yang bermanfaat
- iv. Persentase perkawinan perempuan usia < 20 th tingkat pencapaian indikator kinerja sebesar 104,16% dari target dengan kategori *Sangat Berhasil*, bila secara data yang ada persentase perkawinan perempuan usia < 20 th di tahun 2021 sebesar 16,10% yang berarti bahwa masih ada 16,10% yang perempuan melakukan perkawinan pada usia kurang dari 20 tahun. Hal ini akan berpengaruh pada kesehatan reproduksinya. Demikian juga ini berpengaruh pada aspek psikologisnya.

Kendala

1. Budaya masyarakat

Solusi

1. Pendekatan kepada tokoh masyarakat

- c) Sasaran program tersedianya parameter pengendalian penduduk dengan indikator kinerja persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga dengan tingkat capaian sebesar 100% dengan kategori *Sangat Berhasil*. Terpenuhinya data mikro keluarga yang sampai pada tingkat desa/kelurahan yang akurat dan dinamis akan sangat berguna dalam menentukan perencanaan dan sasaran yang tepat sehingga program KKBPK dapat tercapai sesuai dengan tujuan.

Kendala

1. SDM kader yang masih kurang
2. Kurangnya pemanfaatan data yang ada
3. Sarana dan prasarana yang terbatas

Solusi

1. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan pada kader

2. Peningkatan koordinasi dengan pemangku kebijakan
 3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal
- d) Sasaran program meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender dengan indikator
- i. Persentase OPD yang responsif gender capaian realisasi sebesar 100% dari target yang berarti *Sangat Berhasil*. Capaian ini menandakan bahwa setiap OPD telah melaksanakan anggaran yang responsif gender karena setiap OPD telah mendapatkan pelatihan dan pembinaan dalam penyusunan anggaran yang responsif gender.

Kendala

1. Kurangnya pemahaman SKPD tentang responsif gender
2. Sasaran Advokasi dan pembinaan sering kali berganti
3. Kegiatan Tim Driver Kabupaten Kediri belum maksimal

Solusi

1. Penerbitan surat edaran tentang PUG
 2. Bimtek pada seluruh SKPD
 3. Kegiatan TIM Driver yang dioptimalkan
 4. Peningkatan koordinasi dengan SKPD
 5. Penyusunan payung hukum
- ii. Persentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat desa dengan tingkat capaian sebesar 125% dari target yang berarti *Sangat Berhasil*.

Kendala

1. Pandemi covid 19
2. Pemahaman yang kurang tentang PUG dan hak anak
3. Kurangnya koordinasi

Solusi

1. Peningkatan koordinasi dengan pemangku kebijakan
 2. Peningkatan sosialisasi ke masyarakat
 3. Penyusunan payung hukum
- e) Sasaran program menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan indikator kinerja
- i. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh P2TP2A capaian realisasai sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan yang berarti *Sangat Berhasil*. Di tahun 2021 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang

telah ditangani oleh P2TP2A sebanyak 69 kasus dengan jumlah kasus anak-anak sebanyak 35 kasus dan dewasa 34.

Kendala

1. Terbatasnya tenaga kesehatan yang terlatih menangani kasus kekerasan pada perempuan
2. Minimnya jumlah pendamping korban KDRT di tingkat desa
3. Minimnya kasus KDRT yang mendapatkan pendampingan psikologi karena keterbatasan tenaga profesional
4. Masih adanya kasus kekerasan yang belum dilaporkan

Solusi

1. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Kediri untuk menyelenggarakan pelatihan penanganan perempuan korban kekerasan bagi tenaga kesehatan
 2. Adanya payung hukum tentang Perlindungan Perempuan
 3. Mengajukan penambahan anggaran untuk meningkatkan fasilitas dalam hal kesehatan, psikologi, maupun pelatihan bagi tim pendamping
 4. Peningkatan koordinasi di P2T2PA
- ii. Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A capaian realisasai sebesar 125% dari target yang telah ditetapkan yang berarti *Sangat Berhasil*. Di tahun 2021 jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang telah ditangani oleh P2TP2A sebanyak 45 kasus dengan jumlah kasus anak laki-laki sebanyak 10 kasus dan perempuan sebanyak 34 kasus.

Kendala

1. Terbatasnya tenaga kesehatan yang terlatih menangani kasus kekerasan pada anak
2. Minimnya jumlah pendamping
3. Masih adanya kasus kekerasan yang belum dilaporkan

Solusi

1. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Kediri untuk menyelenggarakan pelatihan penanganan korban kekerasan bagi tenaga kesehatan
2. Pembentukan forum anak yang bisa mewakili aspirasi anak tingkat kecamatan sampai tingkat desa

3. Adanya payung hukum
4. Sosialisasi
5. Kerja sama dengan instansi terkait

A.5 Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan sasaran strategis dan RPJMD diperlukan dukungan sumberdaya terutama dukungan anggaran. Anggaran yang telah di setuju akan digunakan semaksimal mungkin untuk melaksanakan program dan kegiatan. Dengan penggunaan sumberdaya anggaran ini akan diketahui apakah capaian sasaran dan RPJMD itu dilaksanakan secara efisien atau tidak. Adapun tabel untuk mengukur tingkat efisiensi adalah sebagai berikut :

Tabel III.13
Kategori Tingkat Efisiensi

No.	Selisih % (Persentase capaian kinerja – Persentase penyerapan Anggaran)	Keterangan	Tingkat Efisiensi
1	> 0	Lebih besar dari nol persen	Sangat Efisien
2	= 0	Sama dengan nol	Efisien
3	< 0	Kurang dari nol persen	Kurang Efisien

A.5.1 Capaian Sasaran Strategis

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam upaya pemenuhan target sasaran Strategis DP2KBP3A tahun 2021 dapat dilihat di bawah ini :

Tabel III.14
Capaian Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2021 untuk Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Anggaran			Tingkat Efisiensi *)	
				Pagu	Realisasi	%	Selisih %	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dan pembangunan keluarga	Persentase peserta KB aktif MKJP	127,00	10.793.170.010	9.451.752.577	87,54	39,43	Sangat efisien
		Persentase PUS anggota kelompok BKB, BKR, BKL yang ber-KB	93,17	980.994.000	647.608.620	66,02	27,15	Sangat efisien
2.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh	100	394.317.400	326.874.601	82,90	17,10	Sangat efisien

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Anggaran			Tingkat Efisiensi *)	
				Pagu	Realisasi	%	Selisih %	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		P2TP2A						

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan anggaran DP2KBP3A selama tahun 2021 dalam upaya mencapai target Sasaran Strategis dapat dikategorikan **sangat efisien**.

A.5.2 Capaian Indikator RPJMD

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam upaya pemenuhan target RPJMD DP2KBP3A tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel III.15
Capaian Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2021 Untuk RPJMD

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Anggaran			Tingkat Efisiensi *)	
				Pagu	Realisasi	%	Selisih %	Kategori
1.	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi Modern	Persentase Unmet need	92,35	8941162110	7648439977	85,54	7,81	Sangat efisien
2.	Tersedianya parameter pengendalian penduduk	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	100,00	1852007900	1803312600	97,37	2,63	Sangat efisien
3.	Sasaran Program meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan keluarga	Cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL)	94,84	906694000	577620620	63,71	31,13	Sangat efisien
		Persentase perkawinan perempuan usia < 20 tahun	125	74300000	69988000	94,20	3,80	Sangat efisien
4	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tangani oleh P2TP2A	100	88722500	58182601	65,58	34,42	Sangat efisien
		Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	125	111705000	100582000	90,04	35,96	Sangat efisien
5.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender	Persentase OPD yang responsif gender	100	97285500	75093600	77,19	22,81	Sangat efisien
		Persentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di	125	96604400	93016400	96,29	3,71	Sangat efisien



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Anggaran			Tingkat Efisiensi *)	
				Pagu	Realisasi	%	Selisih %	Kategori
		tingkat desa						

Dari tabel diatas penggunaan anggaran selama tahun 2021 di DP2KBP3A Kabupaten Kediri dapat dikategorikan *Sangat Efisien* karena sebagian besar capaian realisasi kinerja program diatas dibanding persentase penggunaan anggaran ada.

A.6 Analisis Program/Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu tahun 2021 dalam upaya pencapaian pernyataan kinerja yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja telah didukung Program dan Kegiatan serta telah dilaksanakan di dalam tahun 2021

A.6.1 Indikator Sasaran Strategis meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dan pembangunan keluarga

Dalam upaya pencapaiin sasaran stragetis dengan kinerja meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dalam tahun 2021 didukung 3 program dan kegiatan yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III. 16
Data Program dan Kegiatan Pendukung
Capain Sasaran Strategis meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam
Pencapaian KB MKJP dan Pembangunan Keluarga

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
I	<i>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dan pembangunan keluarga</i>		Persentase peserta KB aktif MKJP	30 %	38,1 %	127,00
		I PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase desa/ kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	100 %	100 %	100,00
		1 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah SSK yang mendapatkan pembinaan	12 ssk	11 ssk	91,67
		a Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah SSK yang mendapatkan pembinaan	12 ssk	11 ssk	91,67
		2 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi Program KKBPK	1 dok	1 dok	100,00
		a Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen profil KKBPK yang disusun	1 dok	1 dok	100,00
		b Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen laporan data dan informasi keluarga	3 dok	1 dok	33,33



No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
		c Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah dokumen laporan capaian program bangga kencana	4 dok	1 dok	25,00
		d Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen laporan pengendalian lapangan	5 dok	1 dok	20,00
		e Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan RR klinik	90 klinik	89,0 klinik	98,89
		II PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Unmet need	10,75 %	11,27 %	95,16
		1 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jenis kegiatan advokasi dan KIE yang mendukung program KKBPK	5 jenis	5 jenis	-
		a Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah peserta yang mendapatkan KIE program KKBPK	6000 aksp	10.115 aksp	168,58
		b Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah peserta rakor tentang KIE yang sesuai dengan kearifan lokal	150 orang	145,0 orang	96,67
		c Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah kecamatan yang mendapatkan sarana KIE program KKBPK	26 kec	25,0 kec	96,15
		d Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah media yang digunakan untuk mendukung program KKBPK	5 media	5 media	100,00
		e Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah balai penyuluhan KB yang mendapatkan operasional	26 BP KB	26,0 BPKB	100,00
		2 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga penyuluh KB yang mendapatkan pembinaan	90 %	100 %	111,11
		a Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Ketersediaan kader penyuluh sampai tingkat dusun	3.335 orang	3.335 orang	100,00
		3 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jenis pelayanan dan pendistribusian alkon	4 jenis	4 jenis	100,00
		a Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang mendapatkan distribusi alkon	89 faskes	89 faskes	100,00
		b Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB Baru MKJP yang terlayani	6500 aksp	10.115 aksp	155,62
		c Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Layanan kasus komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	12 bln	12 bln	100,00
		d Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana prasarana penunjang pelayanan KB	1 paket	1 paket	100,00
		4 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kampung KB yang di bina	82 KKB	82 KKB	-
		a Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang di bina	82 KKB	82 KKB	100,00
			Persentase PUS anggota kelompok BKB, BKR, BKL yang ber-KB	BKB 85%; BKR 84,5%; BKL 81%	BKB 81,18%; BKR 78%; BKL 74,28%	BKB 95,51 %; BKR 92,31%; BKL 91,70%
		III PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL)	BKB 31,41%; BKR 26,6%; BKL 34,17%	BKB 30,24%; BKR 24,05%; BKL 33,42%	BKB 97,09 %; BKR 88,14%; BKL 96,11%
		1 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok sasaran pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	6 sasaran	6 sasaran	100,00

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
		a Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah KKA dan BKB kit Stunting yang diadakan	6030 lb / unit / 8	8 / unit 613 / lbr 5	
		b Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pengelola kelompok Tri bina yang dilatih	50 orang	50 orang	100,00
		c Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader kelompok tri bina yang dilatih	50 orang	50 orang	100,00
		d Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi 1000 HPK	5250 orang	3000 orang	57,14
		e Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pelaksanaan pameran harganas	1 event	1 event	100,00
		f Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Desa stunting yang dibina	30 desa	30 desa	100,00
			Persentase perkawinan perempuan usia < 20 tahun	16,8 %	16,1 %	104,17
		2 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pembina dan kelompok PIK yang dibina	90 klp	90 kelp	100,00
		a Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok PIK yang mendapatkan pembinaan	90 klp	90 kelp	100,00
		b Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pembina PIK yang mendapatkan pembinaan	100 Orang	100 orang	100,00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian realisasi program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dan pembangunan keluarga dapat dikatakan berhasil dengan baik.

A.6.2 Indikator Sasaran Strategis meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dalam tahun 2021 telah

didukung 3 program 3 kegiatan yang telah dilaksanakan seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel III.17
Data Program dan Kegiatan Pendukung
Capain Sasaran Strategis meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	
I	<i>Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan</i>		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A	100 %	100 %	100,00	
		I	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang responsif gender	100 %	100 %	100,00
		1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	63 Opd	37 opd	76,56
		a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perda PUG dan PPA	2 Dok	1 dok	76,56
		2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok perempuan yang berperan dalam pembangunan	15 Klp	6 klp	90,69
		1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok perempuan yang berperan dalam pembangunan	15 Kelp	6 klp	90,69
		II	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tangani oleh P2TP2A	78 %	100 %	65,58
		1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan perlindungan perempuan	1 Dok	1 dok	65,44
		a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan perlindungan perempuan	1 Dok	1 dok	65,44
		2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	12 Bln	12 bln	65,76
		a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	12 Bln	12 bln	65,76
		III	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat desa	80 %	100 %	96,29
		1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan event	3 Event	3 event	96,29
		a	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan event	3 event	3 event	96,29
		IV	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	80 %	100 %	90,04
		1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan perlindungan anak	1 Dok	1 dok	94,32



No.	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
		a Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan pemenuhan hak anak	1 Dok	1 dok	94,32
		2 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan pemenuhan hak anak	1 Dok	1 dok	87,09
		a Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rapat koordinasi perlindungan dan tumbuh kembang anak	25 Orang	25 orang	100,00
		b Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan pemenuhan hak anak	1 Dok	1 dok	86,45

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian realisasi program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat dikatakan telah berhasil dengan baik.

B. Realisasi Anggaran

Secara keseluruhan penyerapan anggaran tahun 2021 DP2KBP3A adalah sebagai berikut :



Tabel III.18
Realisasi Anggaran DP2KBP3A Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja				Anggaran (Rp)		
			Tolok Ukur	Target	Realisasi	Capatan Realisasi (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capatan Realisasi (%)
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan			Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A	100%	100%	100%			
	I	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	<i>Persentase OPD yang responsif gender</i>	100%	100%	100,00	97.285.500	75.093.600	77,19
	1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	63 OPD	37 OPD	76,56	92.988.000	71.196.100	76,56
		a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah dokumen kebijakan PUG	1 dokumen	1 dokumen	76,56	92.988.000	71.196.100	76,56
	2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok perempuan yang berperan dalam pembangunan	15 kelompok	6 kelompok	90,69	4.297.500	3.897.500	90,69
		a Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok perempuan yang berperan dalam pembangunan	15 kelompok	6 kelompok	90,69	4.297.500	3.897.500	90,69
	II	PROGRAM PER LINDUNGAN PEREMPUAN	<i>Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tangani oleh P2TP2A</i>	100%	100%	65,58	88.722.500	58.182.601	65,58
	1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan perlindungan perempuan	1 dokumen	1 dokumen	65,44	50.722.500	33.193.200	65,44
		a Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan perlindungan perempuan	1 dokumen	1 dokumen	65,44	50.722.500	33.193.200	65,44
	2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	12 bulan	12 bulan	65,76	38.000.000	24.989.401	65,76
		a Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	12 bulan	12 bulan	65,76	38.000.000	24.989.401	65,76
	III	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	<i>Persentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat desa</i>	80%	100%	96,29	96.604.400	93.016.400	96,29
	1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan event	3 event	3 event	96,29	96.604.400	93.016.400	96,29
		a. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan event	2 event	2 event	96,29	96.604.400	93.016.400	96,29
	IV	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	<i>Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A</i>	80%	100%	90,04	111.705.000	100.582.000	90,04
	1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan perlindungan anak	1 dokumen	1 dokumen	94,32	45.600.000	43.010.000	94,32



SASARAN STRATEGIS	No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja				Anggaran (Rp)		
			Tolok Ukur	Target	Realisasi	Capatan Realisasi (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capatan Realisasi (%)
		a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan perlindungan anak	1 dokumen	1 dokumen	94,32	45.600.000	43.010.000	94,32
	2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan pemenuhan hak anak	1 dokumen	1 dokumen	87,09	66.105.000	57.572.000	87,09
		a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	1 dokumen	1 dokumen	100,00	3.145.000	3.145.000	100,00
		b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan pemenuhan hak anak	1 dokumen	1 dokumen	86,45	62.960.000	54.427.000	86,45
	V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	80%	80%	80%	4.240.790.742	3.516.138.298	82,91
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	4.914.000	4.734.000	96,34
		a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2.750.000	2.570.000	93,45
		b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2.164.000	2.164.000	100,00
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	3.982.459.703	3.286.118.177	82,51
		a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	3.497.192.700	2.844.781.810	81,34
		b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	12 laporan	12 laporan	116.436.693	96.391.967	82,78
		c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	351.380.000	327.940.000	93,33
		d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10.500.000	10.055.000	95,76
		e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan bulanan /semesteran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6.950.310	6.949.400	99,99
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	15.600.000	14.400.000	92,31
		a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	15.600.000	14.400.000	92,31
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	6 laporan	6 laporan	6 laporan	42.124.650	39.863.913	94,63
		a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	1 paket	1 paket	1 paket	1.390.000	1.390.000	100,00
		b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	1 paket	1 paket	1 paket	7.000.000	6.972.710	99,61



SASARAN STRATEGIS	No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja				Anggaran (Rp)		
			Tolok Ukur	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi (%)
		c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	3 paket	3 paket	3 paket	7.263.650	7.000.000	96,37
		d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket pengadaan	12 paket	12 paket	12 paket	3.000.000	2.568.000	85,60
		e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	21.071.000	19.533.203	92,70
		f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	2.400.000	2.400.000	100,00
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	34.232.589	29.627.657	86,55
		a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	12 paket	12 paket	12 paket	2.345.600	1.769.000	75,42
		b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	7.859.139	4.058.657	51,64
		c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket pelayanan umum kantor	1 paket	1 paket	1 paket	24.027.850	23.800.000	99,05
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	3 laporan	3 laporan	3 laporan	161.459.800	141.394.551	87,57
		a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa	1 paket	1 paket	1 paket	117.381.800	97.736.551	83,26
		b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 paket	1 paket	1 paket	22.078.000	22.078.000	100,00
		c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 paket	1 paket	1 paket	22.000.000	21.580.000	98,09
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dan pembangunan keluarga			Persentase peserta KB aktif MKJP	30%	38,10%	127%		
VI		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	100%	100%	100%	1.852.098.400	1.803.312.600	97,37
1		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah SSK yang mendapatkan pembinaan	12 sekolah	11 sekolah	91,67	33.365.000	30.371.000	91,03
		a. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah SSK yang mendapatkan pembinaan	12 sekolah	11 sekolah	91,67	33.365.000	30.371.000	91,03
2		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi Program KKBPK	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1.818.733.400	1.772.941.600	97,48
		a. Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen profil KKBPK yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100,00	10.707.800	10.065.000	94,00
		b. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen laporan data dan informasi keluarga	3 dokumen	1 dokumen	33,33	9.820.000	6.890.000	70,16



SASARAN STRATEGIS	No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja				Anggaran (Rp)		
			Tolok Ukur	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi (%)
		c. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah dokumen laporan capaian program bangga kencana	4 dokumen	1 dokumen	25,00	126.842.600	120.817.100	95,25
		d. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen laporan pengendalian lapangan	5 dokumen	1 dokumen	20,00	1.651.200.000	1.616.800.000	97,92
		e. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan RR klinik	90 klinik	89 klinik	98,89	20.163.000	18.369.500	91,10
	VII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Unmeet need	10,47%	11,27%	95,16	8.727.980.490	7.648.439.977	87,63
	1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jenis kegiatan advokasi dan KIE yang mendukung program KKBPK	5 jenis	5 jenis	-	2.121.433.490	2.091.221.347	98,58
		a. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah peserta yang mendapatkan KIE program KKBPK	6000 akspr	10115 akspr	168,58	117.964.000	114.814.000	97,33
		b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah peserta rakor tentang KIE yang sesuai dengan kearifan lokal	150 orang	145 orang	96,67	26.199.470	25.080.000	95,73
		c. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah kecamatan yang mendapatkan sarana KIE program KKBPK	26 kec	26 kec	96,15	258.718.400	238.917.807	92,35
		d. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah media yang digunakan untuk mendukung program KKBPK	5 media	5 media	100,00	29.998.980	29.628.000	98,76
		e. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah balai penyuluhan KB yang mendapatkan operasional	26 balai Peny.	26 KKB	100,00	1.688.552.640	1.682.781.540	99,66
	2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga penyuluh KB yang mendapatkan pembinaan	90%	100%	100,00	2.603.474.330	2.603.474.330	100,00
		a. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Ketersediaan kader penyuluh sampai tingkat dusun	3335 orang	3335 orang	100,00	2.603.474.330	2.603.474.330	100,00
	3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jenis pelayanan dan pendistribusian alkon	4 jenis	4 jenis	100,00	2.684.768.670	2.209.144.300	82,28
		a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang mendapatkan distribusi alkon	89 faskes	89 faskes	155,62	55.645.000	55.645.000	100,00
		b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB Baru MKJP yang terlayani	5750 akseptor	10115 akspr	100,00	165.951.000	1.925.578.100	1.160,33
		c. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Layanan kasus komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	12 bulan	12 bulan	100,00	2.383.985.950	28.618.900	1,20
		d. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana prasarana penunjang pelayanan KB	1 paket	1 paket	-	60.000.000	199.302.300	332,17
	4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kampung KB yang di bina	82 Kampung KB	82 KKB	100,00	1.318.304.000	744.600.000	56,48



SASARAN STRATEGIS	No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja				Anggaran (Rp)		
			Tolok Ukur	Target	Realisasi	Capatan Realisasi (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capatan Realisasi (%)
		a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang di bina	82 Kampung KB	82 KKB	100	1.318.304.000	744.600.000	56,48
			Persentase PUS anggota kelompok BKB, BKR, BKL yang ber-KB	BKB 85%; BKR 84,5%; BKL 81%	BKB 81,18%; BKR 78%; BKL 74,28%	BKB 95,51 %, BKR 92,31%, BKL 91,70%			
VIII		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL)	BKB 31,41%; BKR 26,6%; BKL 34,17%	BKB 30,24%; BKR 24,05%; BKL 33,42%	BKB 97,09 %, BKR 88,14%, BKL 96,11%	980.994.000	647.608.620	66,02
	1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok sasaran pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	6 sasaran	6 sasaran	100	906.694.000	577.620.620	63,71
		a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah KKA dan BKB Kit Stunting yang diadakan	6000 lb / 8 unit	6135 lb / 8 unit	100	196.502.400	182.003.020	92,62
		b. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pengelola kelompok Tri bina yang dilatih	50 orang	50 orang	100,00	7.518.100	4.728.100	62,89
		c. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader kelompok tri bina yang dilatih	50 orang	50 orang	100,00	7.759.900	4.789.900	61,73
		d. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi 1000 HPK	5250 orang	3000 orang	57,14	607.400.000	312.000.000	51,37
		e. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta yang mengikuti peringatan Harganas	20 orang	20 orang	100,00	7.441.000	6.993.000	93,98
		f. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Desa stunting yang dibina	30 desa	30 desa	100,00	80.072.600	67.106.600	83,81
			Persentase perkawinan perempuan usia < 20 tahun	16,80%	16,10%	104,17		-	
	2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pembina dan kelompok PIK yang dibina	90 kelompok	90 kelompok	100,00	74.300.000	69.988.000	94,20
		a. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerak Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok PIK yang mendapatkan pembinaan	90 kelompok	90 kelompok	100,00	70.550.000	66.238.000	93,89



SASARAN STRATEGIS	No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja				Anggaran (Rp)		
			Tolok Ukur	Target	Realisasi	Capatan Realisasi (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capatan Realisasi (%)
		b. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pembina PIK yang mendapatkan pembinaan	100 orang	100 orang	100,00	3.750.000	3.750.000	100,00
							16.409.362.652	13.942.374.096	84,97

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri selama tahun 2021, sesuai dengan rencana kinerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA-SKPD, mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 16.409.362.652,-. Dari alokasi tersebut 84,97% atau Rp. 13.942.374.096,- terserap.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri berkaitan dengan penyelenggaraan kinerja tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri dapat disimpulkan bahwa rata-rata sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategi 2016- 2021 sudah tercapai.

Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa

1. Sasaran Strategis

Indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan selama tahun 2021 telah tercapai dengan skala pengukuran *sangat berhasil* dengan capaian yang meliputi :

- i. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Realisasi pencapaian KB MKJP dan pembangunan keluarga dengan indikator :
 - Persentase peserta KB aktif MKJP sebesar 127%
 - Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber-KB sebesar 95,51%
 - Persentase PUS anggota kelompok BKR yang ber-KB sebesar 92,31%
 - Persentase PUS anggota kelompok BKL yang ber-KB sebesar 91,70%
- ii. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dengan indikator Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A tercapai sebesar 100%

1. Indikator RPJMD

Indikator RJPMD yang telah dicapai selama tahun 2021 pada skala pengukuran indikator kategori *sangat berhasil* dengan indikator kinerja sebagai berikut

a. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi modern dengan indikator :

- Persentase Unmeet need tercapai sebesar 92,35%
- Tersedianya parameter pengendalian penduduk dengan indikator Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga tercapai sebesar 100%

b. Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan keluarga dengan indikator

- Cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL) BKB 96,27% BKR 90,45% dan BKL 97,80%

- Indikator Persentase perkawinan perempuan usia < 20 tahun tercapai sebesar 104,16%
- c. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan indikator
 - Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tangani oleh P2TP2A 100%
 - Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A 125%
- d. Meningkatnya kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender dengan indikator :
 - Persentase OPD yang responsif gender tercapai sebesar 100%
 - Peresentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat desa 125%

Dari capaian indikator RPJMD sebagaimana besar telah tercapai kecuali unmeetneed yang masih belum tercapai dan capaian peserta KB baru

Kendala yang menjadi perhatian DP2KBP3A Kabupaten Kediri antara lain :

1. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Jumlah pegawai (PNS) pada tahun 2021 sebanyak 90 orang, 62 diantaranya Penyuluh KB (PKB) yang menjadi pegawai pusat. Rasio antara jumlah PKB dengan desa/kelurahan binaan masih jauh dari target SPM. Rasio yang diharapkan 1 : 2, sedangkan realisasinya masih 1 : 5-6
2. Belum maksimalnya fungsi forum anak di tingkat kabupaten maupun peran tim gugus tugas trafiking untuk mencegah kejadian perdagangan manusia di wilayah Kabupaten Kediri
3. Minimnya pemahaman masyarakat terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan UU perlindungan anak.
4. Kegiatan kelompok Tri bina dan UPPKS belum berjalan sesuai harapan. Kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja maupun Bina Keluarga Lansia sudah terbentuk, namun kegiatan-kegiatan yang dilakukan masih sangat terbatas karena keterbatasan dana dan sarana prasarana.
5. Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan primer dapat melayani KB dan kesehatan reproduksi, masih banyak pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi yang kurang efektif dan efisien untuk jangka panjang

Langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan DP2KBP3A Kabupaten Kediri untuk meningkatkan kinerjanya adalah :

1. Mensosialisasikan SPPA dan UU perlindungan anak ke masyarakat dengan melibatkan PKK Kab. Kediri, BPMPD dan Polres/Polresta
2. Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melibatkan : GOPTKI, HIMPAUDI, Disdikpora, PKK Kab. Kediri, Dinkes, Polres/Polresta, Muslimat, Fatayat dan Aisyiah
3. Pembentukan forum anak sampai tingkat kecamatan dan desa untuk memaksimalkan fungsinya
4. Advokasi kepada kepala desa agar memahami arti pentingnya kegiatan kelompok-kelompok tri bina yang ada di desa. Dengan demikian di kemudian hari ada perhatian dan dukungan dari pemerintah desa setempat. Serta mengajukan anggaran untuk biaya operasional tenaga pendamping, kader dan kelompok tribina
5. Advokasi kepada stakeholder terkait untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas PIK remaja sebagai wadah KIE mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko dengan harapan jumlah perkawinan usia < 20 tahun bisa turun
6. Memberikan pemahaman kepada kalangan pondok pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan bahwa pernikahan usia dini akan memberikan dampak negatif, diantaranya belum matang secara fisik dan psikis.
7. Menggalang dukungan dan komitmen dari semua pihak untuk membuat terobosan baru dalam penyusunan program kerja DP2KBP3A Kabupaten Kediri.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri yang dapat disajikan sebagai petanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- Visi : Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif dan Berkeadilan yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional
- Misi 10 : Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan
- Tujuan 1 : Meningkatkan pelayanan keluarga berencana

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Kondisi Awal	Target						Program
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dan pembangunan keluarga	a. Persentase Peserta KB Aktif MKJP	$\frac{\text{Aktif MKJP}}{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}} \times 100\%$	21,2	22,67	24,13	25,6	27,07	28,53	30	1. Keluarga Berencana 2. Pelayanan kontrasepsi 3. Kesehatan Reproduksi Remaja 4. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling 5. Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam pelayanan KB /KR yang mandiri 6. Promosi Kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 7. Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 8. Peningkatan Peran Serta Perempuan di Pedesaan 9. Pengendalian penduduk
	b. Persentase PUS anggota kelompok BKB, BKR, BKL yang ber-KB	$\frac{\text{Jumlah PUS anggota kelompok BKB, BKR, BKL yang Ber-KB}}{\text{Jumlah PUS anggota kelompok BKB, BKR dan BKL}} \times 100\%$	BKB : 83,99 , BKR : 83,21, BKL : 78,72	BKB : 84,16 BKR : 83,43 BKL : 79,10	BKB : 84,33 BKR : 83,64 BKL : 79,48	BKB : 84,50 BKR : 83,86 BKL : 79,86	BKB : 84,66 ; BKR : 84,07 ; BKL : 80,24	BKB : 84,83 ; BKR : 84,29 ; BKL : 80,62	BKB : 85,00 , BKR : : 84,50 , BKL : : 81,00	



RENCANA STRATEGIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Visi : Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif dan Berkeadilan yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional

Misi 10 : Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan

Tujuan 2 : Meningkatkan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Kondisi Awal	Target						Program
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A	$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang ditangani}}{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang dilaporkan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak2. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan3. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan4. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan



**RENCANA AKSI TAHUN 2021
DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dan pembangunan keluarga	1. Persentase Peserta KB Aktif MKJP 2. Persentase PUS anggota kelompok BKB, BKR, BKL yang ber-KB	-	-	-	30,00%
			-	-	-	BKB 85,00% BKR 84,50% BKL 81,00%



No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / INDIKATOR KEGIATAN (OUPUT)		JADWAL PELAKSANAAN			ANGGARAN	
		INDIKATOR	TARGET	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pengendalian Penduduk	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	100,00%					1.852.853.900
	1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		√	√	√	√	
	a Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah SSK yang mendapatkan pembinaan	20 SSK	√	√	√	√	33.274.500
	2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen evaluasi Program KKBPK			√	√		
	a Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil KKBPK yang disusun	1 dokumen		√	√		11.123.800



	b Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen laporan data dan informasi keluarga	2 dokumen	√		√		10.050.000
	b Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Kecamatan yang melakukan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	26 kecamatan	√	√	√	√	126.842.600
	c Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen laporan pengendalian lapangan	12 dokumen	√	√	√	√	1.651.200.000
	d Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan RR Klinik	140 peserta	√	√	√	√	20.363.000
2	Program Keluarga Berencana	Persentase Unmeet need	10,70%					9.773.146.890
	1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase media yang mendukung program KKBPK		√	√	√	√	
	a Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah peserta yang mendapatkan advokasi program KKBPK	300 orang	√	√	√	√	117.964.000
	b Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah peserta rakor tentang KIE yang sesuai dengan kearifan lokal	140 orang		√	√		26.199.470
	c Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah kecamatan yang mendapatkan sarana KIE program KKBPK	26 kecamatan	√	√	√	√	258.718.400
	d Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah media yang digunakan untuk mendukung program KKBPK	3 media	√	√	√	√	29.998.980
	e Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah balai penyuluhan KB yang mendapatkan operasional	26 Balai Penyuluhan	√	√	√	√	1.688.552.640
	2 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga penyuluh KB yang mendapatkan pembinaan		√	√	√	√	
	a Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah balai yang mendapatkan rehab	3 balai penyuluh KB	√	√			140.004.000



	b Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Prosentase kader IMP yang aktif	100%	√	√	√	√	2.765.730.000
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Faskes yang terpenuhi kebutuhan alokon	90%	√	√	√	√	
a	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontra sepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang mendapatkan distribusi alkon	89 faskes	√	√	√	√	165.951.000
b	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB Baru MKJP yang terlayani	8850 aksp	√	√	√	√	3.124.924.400
c	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah kasus komplikasi yang terlayani	6 kasus	√	√	√	√	60.000.000
d	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana prasarana di gudang alkon yang diadakan	3 jenis		√	√		76.800.000
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Prosentase organisai kemasyarakatan yang mendukung program KKBPK	90%	√	√	√	√	
a	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mendapatkan operasional kegiatan	80 kampung KB	√	√	√	√	1.318.304.000
4	Program Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok BKB, BKR, BKL yang aktif	BKB 85%; BKR 55%; BKL 75%					1.082.209.000
1.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok kegiatan yang mendukung program bangga kencana	100%	√	√	√	√	
a	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diadakan (BKB Kit Stunting, KKA)	8 unit, 6000 lb		√	√		179.822.400



	b Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pengelola yang diorientasi/dilatih	104 orang		√			7.518.100
	c Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader yang diorientasi/dilatih	104 orang		√			7.759.900
	d Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta yang mengikuti peringatan Harganas	200 orang		√	√		79.987.000
	e Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Desa stunting yang dibina	52 desa	√	√	√	√	687.472.600
2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase organisasi masyarakat yang mendukung program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	90%			√	√	
	a Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok PIK yang mendapatkan pembinaan	100 kelompok			√	√	108.050.000
	b Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pembina PIK yang mengikuti rakor	100 orang			√		11.599.000
JUMLAH								12.708.209.790



**RENCANA AKSI TAHUN 2021
DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI**

Lampiran 2

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	1. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A	-	-	-	100,00%



No.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / INDIKATOR KEGIATAN (OUPUT)		JADWAL PELAKSANAAN				ANGGARAN
		INDIKATOR	TARGET	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang responsif gender	85,00%					104.985.500
	1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase OPD yang mendapatkan Advokasi PUG	85%	√	√	√	√	
	a Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG	200 orang	√	√	√	√	92.988.000
	2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	1 lembaga		√			
	a Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok perempuan yang mengikuti pameran pembangunan	6 kelompok		√			11.997.500
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan P2TP2A	80,00%					74.427.700



	1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi	90%	√	√	√	√	
	a Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	60 orang				√	50.722.500
	2 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang memerlukan layanan lanjutan yang difasilitasi	80%	√	√	√	√	
	a Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	60 orang	√	√	√	√	23.705.200
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Prosentase organisasi Perempuan yang aktif dalam berkegiatan	85%					96.604.400
	1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kelompok Perempuan yang aktif dalam berkegiatan	85%		√	√	√	
	a Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK, Hari Ibu, P2WKSS dan Hari Kartini	400 orang		√	√	√	96.604.400
4	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	90%					49.762.300
	1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kasus kekerasan terhadap anak yang difasilitasi	90%	√	√	√	√	
	a Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	35 orang	√	√	√	√	20.723.700

PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SKPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tahun : 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dan pembangunan keluarga	Persentase Peserta KB Aktif MKJP Persentase PUS anggota kelompok BKB, BKR, BKL yang ber-KB	30% 85% 84,50% 81%	38,1 91,18% 78% 74,28%	127 95,51 92,31 91,70
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A	100	100	100,00 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2021

Rp. 16.409.362.652

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021

Rp. 13.942.374.096,-

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dan pembangunan keluarga	- Persentase Peserta KB Aktif MKJP - Persentase PUS anggota kelompok BKB, BKR, BKL yang ber-KB	30% BKB : 85,00% BKR : 84,50% BKL : 81,00%
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	- Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A	100,00%

Program		Anggaran	
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.240.790.742
2	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	97.285.500
3	Perlindungan Perempuan	Rp	88.722.500
4	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	96.604.400
5	Perlindungan Khusus Anak	Rp	111.705.000
6	Pengendalian Penduduk	Rp	1.852.098.400
7	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	8.941.162.110
8	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	980.994.000
Jumlah Anggaran Belanja Langsung		Rp	<u>16.409.362.652</u>